

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI BINA KARYA
BOJONGKONDANG OLEH PEMERINTAH DESA
BOJONGKONDANG KECAMATAN LANGKAPLANCAR
KABUPATEN PANGANDARAN**

Yusup Herdiawan¹, Regi Refian Garis², Asep Nurdin Roshian Anwar³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: yusupherdiawan893@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Pemberdayaan Kelompok Tani Bina Karya Bojongkondang oleh Pemerintah Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran penelitian di lakukan berawal dari adanya masalah bahwa, Pemerintah desa belum optimal dalam melakukan pengembangan kapasitas individu di bidang pertanian; Pengembangan mutu sumber daya baik melalui pelatihan rutin maupun penyuluhan, Pembinaan kepada masyarakat kelompok tani; serta pengembangan pendukung usaha perekonomian masyarakat, Pemerintah desa belum optimal dalam memberikan dukungan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani, Pemerintah desa belum optimal dalam menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pertanian. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pemberdayaan Kelompok Tani bina karya Bojongkondang oleh Pemerintah Desa Bojongkondang Kecamatan langkaplancar Kabupaten Pangandaran dinilai belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Bojongkondang masih kurang dalam membangun relasi pertolongan, masih kurang dalam membangun komunikasi, masih kurang terlibat dalam pemecahan masalah serta masih kurang merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu lembaga pemerintahan yang berperan sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan sistem politik, ekonomi,

socialbudaya dan pertanahan keamanan yang stabil dan dinamis. Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014

tentang Desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Pembangunan yang berjalan sebelum aspirasi datang dari masyarakat desa sendiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola Desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi di anggap pelaksana yang hanya dijalankan kehijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. Pembangunan yang di buat dari *grassroots* (akar rumput) merupakan pemikiran bahwa pembangunan harus di mulai dari desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional walaupun demikian untuk mendapat mewujudkannya perlu dilakukan kajian dan langkah yang mendalam.

Pemerintah Desa Bojungkondang sangat berperan penting dalam upaya pemberdayaan di desa tersebut dalam mengupayakan inovasi baru untuk meningkatkan tarap hidup warga Desa Bojungkondang sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dari hasil pengelolaan potensi Desa. Desa Bojungkondang termasuk dalam wilayah Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang jumlah penduduknya 4.730 jiwa atau 1.650 kepala keluarga (KK) yang mata pencaharian sebagian besar penduduk

adalah dari sektor pertanian. Berdasarkan data tersebut, Desa Bojungkondang Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang penduduknya mayoritas adalah berprofesi sebagai petani, kegiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotong-royong dan mengandalkan buruh tani perorangan yang ada dilingkungan kampung dalam mengelola lahan pertanian tersebut. Desa Bojungkondang mempunyai wilayah seluas 7.225 hektar yang terdiri dari lahan sawah irigasi seluas 182 hektar, sawah teknis seluas 193 hektar, sawah tadah hujan seluas 1.101 hektar dan lahan perkebunan seluas 1.370 hektar.

Hal tersebut pertanian di Desa Bojungkondang masih mengandalkan kebiasaan lama yang turun temurun dalam pengelolaannya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan petani di desa kurang memiliki kemampuan dalam mengelolah usaha taninya dari sektor pertanian sehingga peneliti memukakan beberapa permasalahan:

1. Kurangnya kebijakan terkait program pemberdayaan petani.
2. Kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usatannya.
3. Masih kurangnya akses yang diberikan kepada petani untuk memperoleh bantuan permodalan dari lembaga keuangan (perbankan) dalam meningkatkan usahatannya.

Permasalahan - permasalahan tersebut disebabkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian seperti kurang melakukan penyadaran dan pembentukan perilaku sadar sehingga masyarakat kurang menyadari potensi yang ada, hal ini dikarenakan pemerintah desa jarang melakukan bimbingan yang dilakukan kepada masyarakat dalam bidang pertanian. Dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang melakukan transformasi terhadap perkembangan pertanian sehingga masyarakat belum memahami dalam meningkatkan hasil pertanian, terlepas dari itu juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang meningkatkan kemampuan inovatif masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam mengembangkan bidang pertanian. Hal ini dikarenakan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu memasarkan hasil produksinya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan berasal dari kata dasar-daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan

untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidup sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2018:9) mengungkapkan bahwa:

Pemberdayaan adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumberdaya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan (*up grade*) kuitilitas dari objek yang diberdayakan.

Selanjutnya menurut Menurut Nugroho (2017:3) mendefinisikan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

Pemberdayaan merupakan suatu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu pemerdayaan diaktualisasikan partisipasi masyarakat dengan dengan pendampingan yang di lakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk menteransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir.

Selanjutnya menurut Basyid (2017:3-4) pemerdayaan tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Penyediaan sarana dan prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha.
2. Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
3. Fasilitasi pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi.
4. Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat.

Maka teori pemberdayaan dapat dimaksudkan sebagai kegiatan

memberi keadilan bagi masyarakat supaya meningkatkan kesadaran politis kekuasaan pada kelompok-kelompok yang lemah dengan dapat memberikan hasil atau pengaruh baik kepada pelaksana atau sasaran pemberdayaan, sehingga pemberdayaan dapat dijalankan dengan baik serta tujuan dari pada pelaksanaan program dapat mencapai sasaran program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam memuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk menciptakan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki Hendrawati Hamid (Gunawan, 2009:10).

Padahakikatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditunjukkan pada individual, tetapi juga secara berkelompok sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, manusia/masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai akulturasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia akan memberikan sumbangan untuk

menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan masyarakat.

Menurut Hendrawati Hamid (Suharto, 2010:11), pemberdayaan menunjukkan kemampuan pada orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan keskitan.
2. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani diarahkan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang aktif dalam mengelola sumber daya alam dalam bidang pertanian, meningkatkan sumber penghasilan masyarakat, dan dilaksanakan melalui dua pendekatan sebagai wadah pemberdayaann masyarakat, yaitu:

1. Pusat Informasi Masyarakat
Pusat Informasi masyarakat suatu wadah dalam pemberdayaan masyarakat yang dikelola dari Pemerintah Desa untuk masyarakat guna memberikan pelayanan

informasi, serta kegiatan-kegiatan yang penunjang lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat diantaranya melalui, kelompok tani akan sangat berarti untuk menjawab permasalahan dalam permasalahan pertanian masyarakat desa tersebut.Selain itu, pusat Informasi masyarakat adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan pengelolaan sumber pertanian agar lebih baik yang dikelola dari pemerintah desa untuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan informasi.

2. Bina Masyarakat

Bina masyarakat adalah Suatu Kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari masyarakat dalam bidang pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pelatihan dan pengembangan anggota kelompok. Program kelompok tani ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya sumber daya yang ada dengan mengutamakan dari sektor pertanian, melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemberdayaan pertanian yang di harapkan mampu meningkatkan potensi desa yang baik.

Hal ini dikembangkan oleh kelompok tani dan dibantu Stakeholder yang ada di Desa. Sasaran ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki berprofesi sebagai Petani sehingga

menjadi wadah dan sumber informasi bagi masyarakat Desa untuk memperoleh pengetahuan tentang pemberdayaan dalam sektor tani agar terwujudnya desa yang mandiri dalam sektor pertanian dan mampu meningkatkan sumber daya alam yang lebih baik dalam pengelolaan potensi yang ada. Tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat ini belum maksimal masih perlu direncanakan dengan baik.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) mengemukakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukis, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seseorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan penulisannya

berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam teknik pengumpulan data, yakni peneliti melakukan wawancara dengan bertanya langsung kepada narasumber menggunakan pedoman wawancara namun dapat berkembang dari pertanyaan tersebut. Selain itu menurut Hadi. S (Sugiyono, 2019:203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. dan studi dokumentasi yaitu dengan peneliti memperoleh bahan-bahan dari buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan fokus penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan hasil penelitan bahwa pemerintah desa hanya melakukan dukungan tanpa ikut terjun langsung kepada masyarakat atau dalam kegiatan kelompok tani. Baik yang di adakan oleh penyuluhan pertanian atau pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh gabungan kelompok tani. Para petani di Desa Bojungkondang sangat di berikan keleluasaan oleh pemerintah desa untuk sating mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Bojungkondang dalam upaya meningkatkan pembangunan melalui kelompok tani. Sejalam dengan teori yang dikemukakan oleh Suharto (2018:67-

68). "pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat". Namun pemerintah desa kurang optimal dalam memberikan peranannya dalam melakukan pelatihan dan pembinaan kompetensi kelompok tani, sehingga kelompok tani beranggapan pemerintah desa hanya memandangi seblah mata petani dan juga kelompok tani, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki desa serta banyaknya program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan undang-undang tentang desa.

Dalam hal ini kelompok tani sebagai pelaku utama dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian harus mampu mengatasi masalah dan kemampuan yang ada. Pemberdayaan kelompok tani merupakan konsep meningkatkan kemandirian petani. Kemampuan ditingkatkan melalui penyuluhan, pendampingan dan pelatihan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan pemberdayaan Kelompok Bina Karya Bojongsong oleh Pemerintah Desa Bojongsong melalui dimensi membangun komunikasi dengan pendekatan menggunakan teori Suharto (2018:67-68) dalam dimensi Penguatan "pemberdayaan harus mampu menumbuhkan - kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjangkau kemandirian mereka". Pemerintah desa sudah melakukan pemberdayaan

melalui program pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok tani, pemerintah desa menjalani kerja sama yang baik dalam mendukung program pemerintah desa di bidang pertanian dan pemerintah desa memberikan dukungan sumber daya yang memadai. Pemberdayaan melalui upaya membangun komunikasi masih dinilai kurang, hal ini terlihat dari kurangnya aktifnya aparat desa mencari relasi yang dapat dijadikan pihak ketiga dalam pemberdayaan kelompok tani diluar penyuluh pertanian dari kecamatan. Dengan begitu keberlangsungan kelompok tani dapat berjalan secara efektif serta dapat mensejahterakan kelompok tani serta ikut menambah anggaran pendapatan desa melalui kelompok tani. Selain itu, pemerintah desa dapat mengoptimalkan BUMdes sehingga dapat menampung modal untuk dapat digunakan oleh masyarakat melalui kelompok tani.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan Pemberdayaan Kelompok Bina, Karya Bojongsong oleh Pemerintah Desa Bojongsong melalui dimensi Perlindungan yang dikemukakan oleh Suharto (2018-67-68) "pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat menengah kebawah". Pemerintah desa sudah melaksanakan pemberdayaan terhadap kelompok tani melalui indikator pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat melalui

kelompok tani agar dapat meningkatkan produktifitas lahan pertanian, pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pelaksanaan pertanian dan pemerintah desa turut serta dalam memecahkan permasalahan di bidang pertanian. Kurang perhatiannya pemerintah desa terhadap kelompok tani berdampak pada lemahnya pembangunan bidang pertanian di desa. Pemerintah desa seharusnya dapat merangkul masyarakat guna menyemangati masyarakat sehingga timbul kesadaran masyarakat dalam turut serta meningkatkan pembangunan pertanian. Dapat menjembatani antara masyarakat pemilik lahan yang kurang produktif dengan masyarakat yang mempunyai kemauan sertani tetapi kurang/tidakmemiliki lahan pertanian. Menampung serta terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat serta mencari solusi dan inovasi dalam memecahkan masalah-masalah bidang pertanian. Menurut hemat peneliti pemerintah desa harus bisa terbuka serta merangkul masyarakat khususnya petani untuk meningkatkan paraitipasi masyarakat pada bidang pertanian serta dapat turut serta untuk ikut memecahkan masalah-masalah bidang pertanian.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan pemberdayaan Kelompok Bina Karya Bojongsong oleh Pemerintah Desa Bojongsong melalui dimensi Penyokongan yang di kemukakan Suharto (2018:67-68)” memberikan

bingbingan dan dukungka agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya”. Pemerintah desa sudah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani melalui indikator pemerintah desa ditetapkan kebijakan sebagai dasar hukum dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pertanian melalui kelompok tani dan pemerintah desa langsung terjun pada kelompok tani untuk mengetahui secara langsung perkembangan pertanian melalui kelompok tani. Pemerintah desa seharusnya dapat mengeluarkan perdes yang berkaitan dengan masalah pertanian/masalah kelompok tani meskipun membuat peraturan tentang perlindungan terhadap petanisudah diatur dalam undang-undang peraturan desa yang mengatur tentang kelompok tani, usaha tani, permodalan serta pemanfaatan lahan dinilai sangat memberikan perlindungan terhadap kelompok tani. Kedudukan kepala desa yang sekaligus sebagai pembina kelompok tani seharusnya dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh tidak sebatas struktur organisasi dalam kelompok tani, namun kepala desa/pemerintah desa dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk keberlangsungan serta kemajuan kelompok tani. Menurut hemat peneliti, bahwasannya pemerintah desa harus lebih dekat dengan kelompok tani, lebih terbuka serta sama-sama berjuang

melaksanakan pembangunan bidang pertanian di desa melalui kelompok tani serta dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang benar-benar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat petani/kelompok tani. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa benar-benar dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat kelompok tani.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan Pemberdayaan Kelompok Tani Bina Karya Bojongsong Oleh Pemerintah Desa Bojongsong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan dimensi pemeliharaan yang di kemukakan oleh Suharto (2018:6768) "memelihara kondisi yang kondusif agar tetap, menjadi keseimbangan distribusi yang baik kepada masyarakat" diketahui bahwa pemerintah desa masih kurang optimal dalam memberdayakan kelompok tani melalui pengembangan kapasitas kemampuan kelompok tani karena adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mendukung pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas individu berupa pengetahuan di bidang pertanian berupa pelatihan.

Pemerintah desa hanya memberikan keleluasaan terhadap kelompok tani tanpadibarengi dengan pemberian daya yang optimal atau pemberian dukungan sarana dan prasarana di bidang pertanian. Pemerintah desa berperan dalam

melakukan pelatihan dan pemerintah desa terhadap kelompok tani disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa. Hal ini dinilai karena kurangnya pengelolaan aset desa atau potensi-potensi desa yang masih belum dikembangkan sehingga tidak menambah pendapatan desa.

Hal ini dikarenakan kurangnya empati, pemahaman serta kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam bidang pertanian. Pemberdayaan melalui upaya membangun komunikasi masih dinilai kurang, hal ini terlihat dari kurang aktifnya aparatur desa mencari relasi yang dapat dijadikan pihak ketiga dalam pemberdayaan kelompok tani diluar penyuluh pertanian dari kecamatan. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah desa.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Kelompok Tani Bina Karya Bojongsong oleh Pemerintah Desa Bojongsong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dinilai belum dilaksanakan secara efektif Melalui pendekatan 5 indikator pemberdayaan menurut Suharto (2018-67:68) yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

Dari ke 5 indikator tersebut ada 3 indikator yang sudah memenuhi syarat pendekatan pemberdayaan walau masih kurang optimal yang dikemukakan oleh Suharto (2018:67-68) yaitu

Pemungkinan, Perlindungan dan Penyokongan. Sementara itu, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu Penguatan yang masih belum terwujud contohnya kurangnya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang di miliki masyarakat di bidang pertanian. Kemudian indikator Pemeliharaan, memang masih belum terwujud karena kurangnya sumberdaya manusianya yang menjadi hambatan tersebut sehingga mereka tidak bisa produktif dalam menjalankan program kerja dan juga gorses pengajuan proposal untuk mengajukan dana dalam melakukan pelaksanaan kegiatan program kerja, karena SDM dikalangan kelompok tani yang mampu mengembangkan atau mengelola anggaran.

Secara umum hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Bina Karya Bojongsong Oleh Pemerintah Desa Bojongsong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yaitu kurangnya peran pemerintah desa dalam melakukan program di bidang pertanian dimana hal ini sangat penting dalam mengembangkan atau meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, dengan sekurang-kurangnya perhatian pemerintah desa sehingga kinerja kelompok tani dinilai kurang optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja kelompok tani.

Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mengenai Kelompok Tani Bina Karya Bojongsong Oleh Pemerintah Desa Bojongsong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yaitu dengan cara meningkatkan perhatian pemerintah desa dalam meningkatkan sumberdaya daya manusia melalui kelompok tani dengan upaya pembelajaran, pelatihan, dan pemerhatian secara berkala agar mampu meningkatkan kemampuan/pengetahuan masyarakat di bidang pertanian dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor pertanian dengan selalu mengupayakan meningkatkan sumberdaya manusianya sehingga mereka bisa meningkatkan dan mengembangkan pertanian tersebut dengan lebih efektif dan efisien.

Dari pendapat diatas bahwasanya ketika sumberdaya manusia yang berkualitas maka akan sangat berpengaruh terhadap persaingan yang terjadi dan peningkatan ekonomi, oleh karena itu sumberdaya manusia sangatlah penting dalam meningkatkan pemberdayaan di bidang pertanian. Sehingga dengan manusianya yang berkualitas di era modern ini maka akan mampu mencapai keunggulan dan kualitas yang sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Edi Suharto, Ph.D. (2017). *Membangun masyarakat memperdayakan masyarakat*. Bandung PT. Rafika Aditania.

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Silalahi, Ulber (2012). *Metode penelitian sosial*: Bandung PT. Rafika Aditania. Hermawan,
- Iwan (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methode*. Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan.
- Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 460-473.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Dr. Saifuddin Yunus, Dr. Suadi dan Fadli, M. Si (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Langugob, Syiah Kuala. Banda Aceh, Provinsi Aceh.
- Hendrawati Hamid (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. (Anggota, IKAPI Sulsel) Makassar.
- Peraturan Bupati Pangandaran No. 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa Di Kabupaten Pangandaran.
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.